ANALISIS INTEGRASI DAN KOORDINASI TERHADAP IMPLEMENTASI REFOCUSING ANGGARAN DALAM PENANGANAN COVID 19

Dini Nurdiani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Suryakancana Cianjur

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Suryakancana

dnurdiani29@gmail.com

Masuk: Juli 2021

Penerimaan: Agustus 2021

Publikasi: September 2021

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini, Pemerintah Provinsi Banten dihadapkan pada kondisi perekonomian daerah yang lesu akibat pandemi Covid-19 sehingga diperlukan skema pengaturan kebijakan anggaran daerah, mulai dari pengaturan pendapatan daerah, belanja daerah, hingga penetapan anggaran belanja daerah. Pengaturan pembiayaan daerah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Daerah berkewajiban membuat mekanisme penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui refocusing dan realokasi anggaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan penganggaran daerah dalam studi kasus pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pengelolaan APBD pada masa pandemi Covid-19 di Pemerintah Provinsi Banten bahwa, Pemerintah Provinsi Banten telah menjalankan pengelolaan anggaran sesuai dengan arahan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten. pemerintah pusat melalui mekanisme refocusing dan realokasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah secara tepat.

Kata Kunci: Integrasi, Koordinasi, Refocusing Anggaran, Covid-19

ABSTRACT

The problem in this research, the Provincial Government of Banten faced on the condition of the regional economy sluggish due to pandemic Covid-19 so it requires a scheme of setting budgetary policy of regions, ranging from setting regional revenue, regional expenditure, up to the setting of local financing. According to the Circular Letter of the Minister of Finance and Minister of internal Affairs, Local Government is obliged to make the mechanism of setting the Budget Revenue and Expenditure through refocusing and reallocation of the budget. The purpose of this study is to determine how the policy of local budgeting in the pandemic Covid-19 study case on Local Government of Banten Province. The method used in this research is descriptive qualitative using Purposive Sampling. The results showed the policy of the management of the regional budget in the pandemic Covid-19 at the Provincial Government of Banten that, the Provincial Government of Banten has been running a budget management in accordance with the directives and policies that have been set by the central government through the mechanism of refocusing and reallocation of the budget revenue, expenditure, and financing the area appropriately.

Keywords: Integrasi, Koordinasi, Refocusing Anggaran, Covid-19

A. PENDAHULUAN

Diakhir tahun 2019 dunia dihebohkan dengan mewabahnya virus yang mematikan yaitu Corona Virus Disease 19 atau lebih dikenal dengan Virus Covid-19. Virus tersebut dengan cepat menginfeksi manusia di sebagian besar negara-negara di dunia dan menjadi sebuah pandemi. Tidak terkecuali, Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terinfeksi Virus Covid-19, tak tanggung-tanggung sejak awal diumumkannya kasus Covid-19 pada awal Maret 2020 sampai dengan 10 Juli 2020 kasus penduduk yang terinfeksi Covid-19 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Data yang didapat pertanggal 10 Juli 2020 kasus penduduk Indonesia yang terinfeksi sebanyak 72.347 positif, 33.529 pasien sembuh, dan 3.469 pasien meninggal dunia (covid.19.go.id, 2020)

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika tiba-tiba muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul secara lokal di Wuhan – China, lalu merebak dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian dunia.

Perkembangan krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi dunia ini praktis membuat seluruh negara di dunia harus mundur dengan rencana-rencana strategis yang telah ditetapkan semula untuk kemudian digantikan kebijakan tanggap darurat dengan memobilisasi semua sumber daya untuk mengatasi wabah Covid-19. Lembaga think tank dan pemikir strategis mengoreksi proyeksinya, terutama tahun 2020 yang kemungkinan akan terjadi pelambatan, resesi, dan bahkan depresi ekonomi. Pembangunan di setiap negara dipastikan terganggu. Masing-masing negara merevisi APBN-nya dan menyediakan alokasi dana yang besar untuk mengatasi wabah corona ini.

Pasca ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi nasional, secara otomatis kebijakan pemerintah telah dilakukan penyesuaian. Hal ini tentunya tidak terkecuali pada masalah pokok yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan yang dijalankan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat sendiri setidaknya-tidaknya telah menyiapkan regulasi terkait penyesuaian anggaran dalam kerangka penanganan COVID-19 tersebut di antaranya terdapat dalam beberapa regulasi di antaranya Perppu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan COVID-19, Keppres Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas

Percepatan Penanganan COVID-19, Perpres Nomor 52 tahun 2020 tentang Pembangunan Fasilitas Observasi dan Penampungan dalam Penanggulangan COVID-19

Kebijakan pemerintah saat ini tentunya harus menyediakan yang hal-hal yang sifatnya objektif dan cepat sehingga masalah pokok penanganan dan percepatan penyusunan kebijakan dalam mengatasi pandemi COVID-19 dengan sedemikian

rupa dapat ditangani secara baik dan tepat. Kebijakan *refocusing* sangatlah berpotensi terhadap tindak pidana pada saat bencana alam terjadi. Adanya pengalokasian dana dari pemerintah untuk penanggulangan bencana rawan disalahgunakan oleh oknum tertentu yang seharusnya memiliki kewajiban untuk mengelola dana penanggulangan bencana tersebut dengan memperhatikan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi kepentingan kemanusiaan.

Dampak lain dari pandemi Covid-19 ini selain berdampak terhadap perekonomian negara juga berdampak terhadap pengelolaan keuangan di daerah. Salah satunya berdampak pada pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu Kabupaten yang sangat terdampak dari adanya pandemi Covid-19 ini. Perekonomian daerah Kabupaten Cianjur mengalami penurunan dan berdampak pula pada beban manajemen pengelolaan keuangan daerah. Perlu diketahui bahwa berdasarkan data yang didapat pertanggal 20 September 2020 kasus sebaran Covid-19 di kabupaten Cianjur mencapai 3.989 kasus positif (covid19.cianjurkab.go.id, 2020). Pemerintah pusat sendiri telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Perpu tersebut menjadi landasan kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam melakukan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. APBD dijadikan instrument utama dan penting dalam pengendalian Covid-19 di daerah. Melalui kebijakan anggaran, pemerintah akan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan pengendalian dampak ekonomi, dan kebijakan kesehatan. Dengan anggaran yang memadai maka segala bentuk kebijakan dapat diimplementasikan

dengan baik sehingga stabilitas perekonomian dapat terjaga. Melihat fungsi APBD sebagai stabilisasi perekonomian, maka fungsi tersebut berkaitan dengan peran kebijakan anggaran Pemerintah dalam rangka mengurangi gejolak perekonomian (*counter-cyclical*) yang dilakukan baik melalui kebijakan belanja maupun penerimaan daerah. Hal ini terkait erat dengan fungsi kebijakan fiskal sebagai instrumen pengelolaan ekonomi makro (*macroeconomic management*) dari sisi permintaan agregat (*aggregate demand*). Instrumen dalam penyesuaian fiskal.

Kabupaten Cianjur mengatur bagaimana penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah untuk menghadapi perkembangan masalah pandemi Covid tersebut. Permasalahan dalam hal kebijakan penganggaran yang terjadi pada Pemerintah Daerah Provinsi dimasa pandemi membuat efek kejut dalam penganggaran yang sebelumnya telah disusun dan ditetapkan pada APBD Tahun Anggaran 2020. Komponen APBD baik itu Penerimaan, Belanja, dan Pembiayaan terkena dampaknya dan menimbulkan suatu masalah apabila tidak ditindaklanjuti secara cepat. Adapun detail kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu melakukan pergeseran APBD, penambahan belanja dan pembiayaan APBD 2020, yang diprioritaskan untuk alokasi bidang penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan perlindungan sosial atau social safety net.

Di sinilah hal yang patut dilakukan kajian yang mendalam adalah sejauh mana sinergi pemahaman kebijakan *Refocusing* anggaran jika kita melakukan fokus kajian yang dilakukan oleh belanja daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Tentunya hal ini menjadi sangat menarik mengingat di Indonesia sendiri upaya mendelegasikan penanganan COVID-19 oleh pemerintah pusat banyak di delegasikan melalui kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah

B. TINJAUAN TEORI

1. TELAAH LITERATUR

Anggaran merupakan salah satu rencana keuangan untuk masa depan dimana merupakan komponen utama dari perencanaan. Perencanaan itu sendiri merupakan suatu pandangan kedepan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya

dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Anggaran adalah sebuah rencana yang dapat disusun dan dibuat dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam sebuah unit moneter yang mana hal itu meliputi semua kegiatan dalam suatu perusahaan dalam jarak waktu (periode) tertentu pada masa mendatang.

Menurut **Glenn A Welsch** “*Budget is a profit with planning and control may be broadly as defined as systematic and formalized approach for accomplishing the planning, coordinating and control responsibility of management*”. Yang sebagai artinya “Anggaran merupakan suatu anggaran yang dikaitkan dengan fungsi – fungsi dasar manajemen yang meliputi fungsi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan”. Sebelum kita membahas mengenai kedudukan hukum keuangan negara kiranya perlu bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi atau pengertian dari keuangan Negara tersebut. Ada banyak variasi pengertian dari keuangan negara yang didefinisikan oleh para ahli di bidang keuangan Negara. Selanjutnya, pengkajian mengenai pengertian keuangan negara yang terangkum di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga penting untuk kita bahas. Pengertian Keuangan Negara Menurut Pendapat Para Ahli Hukum Berikut ini akan ditunjukkan beberapa pengertian dari keuangan negara menurut pendapat para ahli.

Menurut **M. Ichwan**, keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang. Menurut **Geodhart**, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan Negara menurut **Geodhart** meliputi: a. Periodik; b. Pemerintah sebagai pelaksana program; c. Pelaksana anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan d. Bentuk anggaran Negara adalah berupa suatu undang-undang.

Unsur-unsur definisi keuangan Negara menurut **John F. Due** menyangkut hal-hal sebagai berikut: a. Anggaran belanja yang memuat data keuangan mengenai

pengeluaran dan penerimaan dari tahun-tahun yang sudah lalu; b. Jumlah yang diusulkan untuk tahun yang akan datang; c. Jumlah taksiran untuk tahun yang sedang berjalan; d. Rencana keuangan tersebut untuk suatu periode tertentu; **John F. due** menyamakan pengertian keuangan Negara dengan anggaran (*budget*) Negara. Mengenai hubungan antara keuangan Negara dengan anggaran Negara, Muchsan, menyatakan bahwa anggaran Negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan keuangan Negara.

Menurut **Gildenhuis**, anggaran memiliki enam fungsi, yaitu: a. Sebagai kebijakan yang menggambarkan tujuan dan sasaran khusus yang hendak dicapai melalui suatu pengeluaran dalam anggaran (*a policy statement declaring the goals and specific objectives an authority wishes to achieve by means of the expenditure concerned*). b. Sebagai sarana redistribusi kekayaan sebagai salah satu fungsi public yang paling utama dari anggaran (*redistribution of wealth is one of the most important function of a public budget*). c. Sebagai program kerja pemerintah (*a work program*) d. Sebagai sumber informasi (*as a source of information*) e. Sebagai sarana koordinasi kegiatan pemerintahan (*as a coordinating instrument*) f. Sebagai alat pengawasan legislative terhadap eksekutif (*a control instrument to be used by the legislative authority over the executive authority and by the executive authority over the administrative authority and even for internal control within a single component of the administrative authority*).

Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan dan penganggaran APBN Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan (APBN t-1) yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari:

- a. Penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional;
- b. Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran;
- c. Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan Tinjauan atas prosedur penyusunan anggaran dan realisasi belanja pada sekretariat jenderal biro keuangan BPK RI mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan

prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya;

- d. Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan;
- e. K/L menyusun rencana kerja (Renja);
- f. Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dilaksanakan antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan;
- g. Rancangan awal RKP disempurnakan;
- h. RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR;
- i. RKP ditetapkan.

Tahap penganggaran dimulai dari:

- j. Penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif;
- k. Penetapan pagu indikatif
- l. Penetapan pagu anggaran K/L;
- m. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L);
- n. Penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN; dan
- o. Penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UU tentang APBN kepada DPR. Penetapan/Persetujuan APBN Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, sekitar bulan OktoberDesember.

Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud. Pelaksanaan APBN Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember pada tahun berjalan (APBN t). Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tinjauan atas prosedur penyusunan anggaran dan realisasi belanja pada sekretariat jenderal biro keuangan BPK RI (DIPA) berdasarkan

Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya. 4.

Pelaporan dan Pencatatan APBN Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan. Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir (APBN t+1), sekitar bulan Januari - Juli.

2. Pengertian APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang diterapkan dengan Peraturan Daerah (perda). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut Abdul (2014: 33) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana kegiatan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. Dari beberapa definisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatas menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 9 10 2014, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Abdul (2014: 33) dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan diterapkan dengan peraturan daerah.

a. Teori Integritas

Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari bahasa Inggris "integration" yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi nasional merujuk kepada seluruh unsur dalam rangka melaksanakan kehidupan bangsa, meliputi sosial, budaya ekonomi, maka pada intinya integrasi nasional lebih menekankan persatuan persepsi dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Secara harfiah integrasi berlawanan dengan perpisahan, suatu sikap yang meletakkan tiap-tiap bidang dalam kotak-kotak yang berlainan.

Istilah integrasi dapat dipakai dalam banyak konteks yang berkaitan dengan hal pengaitan dan penyatuan dua unsur atau lebih yang dianggap berbeda, baik dari segi sifat, nama jenis dan sebagainya.

Integrasi ekonomi ialah serangkaian khusus kebijakan antar kelompok Negara regional yang bertujuan untuk meningkatkan pertukaran faktor produksi dalam bentuk barang maupun jasa antar Negara anggota. Integrasi ekonomi yang di bentuk ialah meliputi integrasi perdagangan dan integrasi moneter.

b. Teori Koordinasi

Koordinasi ialah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya sedangkan menurut James G March dan Herbert A Simon pengertian koordinasi ialah sebuah proses atau kegiatan demi mencapai satu kesatuan antara berbagai macam pihak dalam mencapai tujuan bersama. Menurut teori koordinasi, koordinasi merupakan sebuah sinkronisasi atau penyelarasan berbagai pihak dalam berkerja secara tertip dan teratur dalam batasan waktu akan tetapi koordinasi berbeda dengan kerja sama

yang membedakannya ialah aktifitas atau kegiatan yang tercipta tidak dari satu sumber.

Pengertian koordinasi secara umum ialah menyelaraskan atau menyeimbangkan kegiatan kerja dari satu pihak dengan pihak yang lain demi mencapai tujuan masing-masing pihak dan berakhir dengan tujuan bersama syarat sebuah koordinasi ialah di perlukan kematangan dalam segi tepat waktu agar tidak menghambat kinerja dan tugas masing-masing pihak kemudian selalu terjalinnya komunikasi baik dalam satu lingkup pihak maupun dalam satu lingkup yang luas hal tersebut di karenakan agar dari pihak yang satu dengan yang lainnya mengetahui perkembangan informasi dan yang terakhir ialah selalu berpegang pada tujuan akhir agar tidak melenceng dan justru memperburuk keadaan dalam sebuah organisasi

Pengertian dari koordinasi secara khusus ialah kemampuan yang di lakukan sebuah organisasi untuk saling berkerja sama dalam mencapai tujuan dan hal tersebut pun memiliki tujuan-tujuan seperti demi menciptakan efektifitas suatu organisasi secara maksimal yaitu agar dalam satu organisasi mempunyai keberhasilan dalam mencapai semua tujuan secara tepat dan benar kemudian koordinasi mempunyai tujuan yaitu menyatukan pihak luar dan pihak dalam untuk selalu selaras dalam melakukan proses kegiatan sehingga tidak merusak satu organisasi hal tersebut merupakan salah satu kunci pokok dalam mencapai tujuan bersama dan yang terakhir koordinasi bertujuan untuk menstabilkan efisiensi dalam satu organisasi.

Koordinasi secara normative berkaitan erat dengan proses antar pihak atau lingkungan dalam berkegiatan masing-masing yang keberhasilan masing-masing pihaknya sangat di dukung satu dengan lainnya maka dari itu dalam setiap organisasi kunci keberhasilan dalam mencapai langkah tujuan ialah sebuah koordinasi yang baik dan benar. Menurut sisi fungsionalnya koordinasi mengeratkan pihak satu dengan pihak lainnya dalam rangka mencapai semua tujuan dengan maksimal dan memberikan pengalaman serta pembelajaran setiap pihak maupun individu tertentu. Dari kesimpulan pembahasan di atas pengertian koordinasi ialah proses dimana masing-masing pihak menyelaraskan menyeimbangkan dan berkomunikasi secara baik dan benar dengan batasan waktu

untuk mencapai tujuan bersama dan keberhasilan masing-masing pihak menentukan hasil akhirnya.

3. Jenis-Jenis Koordinasi

Pada proses pelaksanaannya, koordinasi terbagi menjadi dua, yaitu koordinasi berdasarkan ruang lingkup dan berdasarkan alur koordinasi.

a. Koordinasi Berdasarkan Ruang Lingkup

Koordinasi yang dibedakan berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi dua bagian. Pertama koordinasi internal, yang memiliki arti hubungan antar tingkat manajer, departemen, eksekutif, cabang, divisi, dan karyawan atau siapa saja yang bekerja dalam suatu organisasi dengan tujuan guna menyelaraskan tujuan dan kegiatan unit kerja yang terdapat didalam organisasi tersebut.

Kedua koordinasi eksternal, yaitu suatu bentuk hubungan antar organisasi dan karyawan dengan lingkungan luarnya, seperti konsumen, masyarakat, supplier, lembaga keuangan, lembaga pemerintah, kompetitor, dll.

b. Koordinasi Berdasarkan Alirannya

Jika dilihat berdasarkan alirannya, maka koordinasi terbagi menjadi dua, yaitu koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah bentuk koordinasi yang dilakukan oleh setiap orang dalam organisasi dan harus bisa memastikan seluruh orang tersebut bisa melakukan tugas yang terintegrasi dan sesuai dengan aturan organisasi.

Koordinasi vertikal ini berhubungan dengan pengarahan serta penyatuan instruksi yang berasal dari setiap atasan unit kerja, seperti seorang manajer marketing yang mengkoordinasikan tugas dengan supervisornya. Tapi di lain hal, seluruh supervisor marketing tersebut harus bekerja secara selaras dengan manajer penjualannya. Sedangkan koordinasi horizontal adalah bentuk koordinasi yang terjalin antar beberapa unit departemen kerja pada tingkatan hirarki manajemen yang sama. Contohnya adalah koordinasi antar pihak departemen marketing dengan departemen pergudangan.

4. Teori Implementasi

Frasa implementasi menjadi salah satu materi pokok dalam kajian hukum dan perundang-undangan sebagai indikator mengukur sejauh mana hukum dapat

berlaku. Implementasi atau dengan kata kerja diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditegaskan dalam asas dimana setiap peraturan perundang-undangan harus dapat diterapkan.

Pengertian Implementasi menurut kadir adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji data dan menerapkan sistem yang diperoleh dari kegiatan seleksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses untuk menguji antara konsep dengan konseptual atau antara teks dan konteks. Berangkat dari sini implementasi dapat dimaksudkan suatu mekanisme dalam menjalankan pengujian atas konsep yang telah ada sebelumnya, peruntukannya untuk sebuah tujuan tertentu. Tentunya implementasi membutuhkan variabel-variabel pencapaian yang ingin diharapkan. Implementasi dalam arti tersebut sebagaimana perbandingan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bayu Dwi Anggono⁶ dimana terdapat disharmonisasi dalam peraturan penanggulangan bencana selama ini yang dapat dilihat dalam perspektif bencana.

5. Teori Refocusing

Weston dkk. juga berpendapat bahwa *refocusing* akan memudahkan manajer untuk memantau dan membuat keputusan yang lebih baik ketika bisnis perusahaan diposisikan lebih sempit. Hal ini juga terjadi dalam sebuah Negara, konsep *Refocusing* juga selayaknya diterapkan dalam menjamin stabilitas keuangan sebuah Negara utamanya ketika menghadapi suatu krisis.

Refocusing menjadi salah satu alternatif untuk meminimalisasi terjadinya resesi ekonomi dalam menjamin stabilitas ekonomi nasional. Pertimbangan *refocusing* tentunya terjadinya hentakan ekonomi global akibat suatu kejadian atau rapuhnya sistem ekonomi akibat dampak dari kebijakan yang tidak tepat atau strategis.

6. Teori Penganggaran Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak

dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Menurut Pekei dalam Dealice Ivana Barbakem, anggaran pemerintah atau yang disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola oleh pemerintah, maka anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial atau uang. Dalam proses penyusunan anggaran disebut penganggaran, maka penganggaran disusun harus berdasarkan kepada kepentingan organisasi sektor publik, dalam penyusunan anggaran oleh pemerintah merupakan tahap yang cukup luas karena tidak hanya mempertimbangkan ekonomi tetapi juga faktor sosial politik yang semakin kental dalam organisasi masyarakat. Penganggaran pada pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program atau aktivitas yang akan dilakukan dalam satu moneter, untuk itu ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam penyusunan anggaran pemerintah adalah aspek perencanaan, aspek pengendalian, serta aspek transparansi dan akuntabilitas secara umum. Dalam penyusunan anggaran pemerintah mempunyai beberapa prinsip anggaran pemerintah di antaranya penguasaan otoritas oleh legislatif, adalah anggaran harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh legislatif sebelum anggaran tersebut dibelanjakan oleh pemerintah/eksekutif dan bersifat transparan dan terbuka yang anggaran disusun secara terbuka atau transparan serta dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat umum.

7. Regulasi Mengatur *Refocusing*

Jika ditelaah dari aspek kebijakan penganggaran, maka setiap regulasi yang disusun pemerintah tentunya berbasiskan anggaran. Hal ini tidak terlepas dari substansi bahwa terdapat pengaturan yang khusus terkait *Refocusing* anggaran yang dibuat pemerintah yaitu Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, akan tetapi setiap regulasi yang dibuat pemerintah tentunya semuanya berbasiskan kebutuhan anggaran.

Dalam Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 sendiri, fokus pengaturan lebih menitiktekanan upaya realokasi anggaran yang sebelumnya diperuntukkan untuk selain penanganan COVID-19 yang kemudian diubah fokus pada upaya mempercepat penanganan COVID-19. Hal ini menjadi sangatlah penting mengingat COVID-19 menjadi salah satu kejadian yang sangat luar biasa. Maka secara substansi jika kita meninjau dari konsep kepentingan masyarakat *Refocusing* anggaran menjadi suatu hal yang keharusan.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menekankan penerbitan Inpres No.4/2020, yang menginstruksikan, seluruh Menteri/Pimpinan/Gubernur/Bupati/Walikota mempercepat *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19 Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 Pemerintah harus menentukan skala prioritas dengan mengurutkan anggaran belanja berdasarkan tingkat urgensinya. Pemerintah dapat melakukan *refocusing* pada anggaran terutama untuk bidang kesehatan dan sosial. *Refocusing* anggaran belanja ini juga diperlukan karena merosotnya asumsi anggaran pendapatan. Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, serta *monitoring* dan evaluasi kinerja penanganan pandemi COVID-19, alokasi dana penanganan pandemi dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus COVID-19. Pemerintah dapat juga melakukan pemangkasan pada belanja-belanja tertentu misalnya pengeluaran untuk perjalanan dinas, belanja rapat, bimbingan teknis, penyuluhan, dan sejenisnya untuk dialihkan pada penanganan COVID-19 yaitu biaya perjalanan dinas, biaya belanja modal

Dalam perspektif kita menyusun peraturan jika kita meninjau Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terdapat beberapa asas pokok. Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib mendasarkan pada: a. Kejelasan tujuan b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan d. Dapat dilaksanakan e.

Kedayagunaan dan kehasilgunaan f. Kejelasan rumusan g. Keterbukaan Di samping asas-asas tersebut dalam Pasal 5, asas lainnya yang juga harus terkandung pada peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah: a. Pengayoman b. Kemanusiaan c. Kebangsaan d. Kekeluargaan e. Kenusantaraan f. Bhinneka Tunggal Ika g. Keadilan h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan i. Ketertiban dan Kepastian hukum, dan j. Keseimbangan, Keserasian dan keselarasan.

Jika kita meninjau dari ketentuan *Refocusing* anggaran di antaranya dalam Inpres Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, upaya menyusun sumber hukum ketentuan tersebut disandarkan pada asas dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Jaminan kepentingan dari asas tersebut tentunya mengarah jaminan atas kepentingan masyarakat.

Indikator adanya asas tersebut pemaknaan dari sisi regulasi bahwa *Refocusing* anggaran merupakan bentuk regulasi yang keluar dari ranah keadilan formal, dimana dalam keadilan formal sendiri nilai prosedural peraturan yang sudah tertanam harus memang benar-benar diterapkan sedemikian rupa. Jika keadilan formal diterapkan maka *Refocusing* anggaran tidak dapat diterapkan karena penganggaran dalam APBN maupun APBD terkait pengadaan barang dan jasa utamanya telah menjadi kesepakatan untuk kepentingan tertentu.

Akan tetapi dalam arti nilai-nilai yang terdapat dalam ketentuan *Refocusing* anggaran, substansi keadilan materiil menjadi salah satu objek yang dikedepankan. Lebih lanjut Mahfud menyatakan, sejak perubahan tahap ketiga UUD 1945, konstitusi kita sudah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dan konsepsi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial Di samping itu, juga dapat dimaknai sebagai wujud keadilan sosial yang menitik tekankan beberapa aspek nilai yang terakomodasi dalam konsep keadilan. Masalah Pokok Keadilan sosial adalah pembagian (distribusi) nikmat dan beban dalam masyarakat yang oleh Brian Barry

dirangkum dalam tiga kelompok yaitu: (1) ekonomi (uang); (2) politik (kuasa); dan sosial (status).

Maka dalam arti regulasi, *Refocusing* anggaran menjadi salah satu kebijakan yang memang dapat diterima bukan hanya dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi sisi konstitusionalitas dimana aspek konstitusionalitas lebih pada upaya menyandarkan kepentingan masyarakat sebagai identitas norma tertinggi dalam konsep hukum di Indonesia.

8. Corona Virus

Corona virus dikategorikan sebagai penyakit sangat berbahaya yang dapat menginfeksi dari manusia ke manusia. Corona virus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan infeksi pernafasan, dari flu biasa hingga penyakit serius seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut (SARS). Penyakit ini terutama menyebar kesetiap orang melalui pernapasan percikan dari batuk (droplet) dan bersin (Putra et al., 2020). Transmisi awal coronavirus adalah tercatat pada tanggal 31 Desember 2019, Kantor perwakilan WHO di China melaporkan kasus pneumonia di Kota Wuhan Provinsi Hubei tidak diketahui epidemiologinya. Pada 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi penyakit pneumonia dari epidemiologi yang tidak diketahui sebagai tipe baru corona virus (corona virus baru). Pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan Covid-19 sebagai Darurat Kesehatan Publik secara Internasional. Pada 12 Februari 2020, WHO secara resmi menetapkan Penyakit coronavirus sebagai penyakit baru yang menginfeksi manusia. Covid-19 disebabkan oleh SARSCOV2 yang termasuk keluarga besar yang sama coronavirus sebagai penyebab SARS pada tahun 2003, hanya saja dengan berbeda jenis virus, (Putra et al., 2020).

Berbagai ahli masih mempelajari corona virus yang terlihat dari berbagai aspek mulai dari aspek perawatan hingga aspek penularan. Setidaknya sampai sekarang, ada dua faktor penyebabnya Corona virus menyebar dengan cepat, yaitu: Pertama, karena Covid-19 adalah penyakit baru, demikian manusia tidak memiliki kekebalan terhadap virus SARS-Cov-2. Kedua, vaksin dan obat-obatan belum ditemukan. Saat ini, para peneliti di seluruh dunia sedang masih bersaing untuk menemukan vaksin dan obat-obatan (UGM, 2020).

C. METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif dimana penulis menguraikan dan menganalisis data dari hasil temuan di lapangan.

D. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Saat ini pandemi covid 19 sudah sangat meresahkan dan bahkan menghambat seluruh aktivitas yang ada. Hal ini tentu saja berdampak kurang baik untuk semua sektor. Salah satu dampak dari wabah covid 19 ini yang begitu terasa adalah di sektor ekonomi.

Dalam kaitannya dengan covid 19 pemerintah tentunya harus bersinergi dengan baik apalagi semua lini diharuskan untuk sama-sama menunjang dalam penanganan covid 19. Baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah harus terus berintegrasi dan berkoordinasi agar tindakan-tindakan penanganan yang dilakukan baik di pusat dan di daerah berjalan seimbang.

Tak terkecuali dengan pemerintah Kabupaten Cianjur, Yang juga merasakan dampak dari covid 19 ini. Banyak yang harus dirombak dalam penganggaran di Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk menangani pandemi ini. Pemerintah Kabupaten Cianjur menyiapkan anggaran sebesar Rp 100 miliar untuk penanganan wabah Covid-19. Cianjur yang dikepung zona merah Corona mengharuskan melakukan pencegahan dan penanganan secara maksimal.

Anggaran penanganan Covid-19 bersumber dari efisiensi anggaran sebesar Rp 64 miliar, dengan rincian anggaran perjalanan dinas dan rapat sebesar Rp 10,2 miliar, perjalanan dinas DPRD Cianjur sebesar Rp 2 miliar, proyek fisik senilai Rp 30 miliar, pengurusan pos kegiatan di Puskesmas dan rumah sakit sebesar Rp 21 miliar, serta anggaran program CNL sebesar Rp 300 juta. Selain itu, ada juga pengalihan anggaran penyertaan modal untuk BJB sebesar Rp 5 miliar, belanja bagi hasil pajak RRp 8 miliar, belanja hibah dan bansos sebesar Rp 4 miliar, dan dana hibah bansos Rp 8 miliar. Selain itu ada juga dana kas sebesar Rp 10 miliar yang juga dialihkan untuk penanganan Covid-19. Dan ditetapkan seluruhnya menjadi Rp 100 miliar.

Sebesar Rp 68 miliar dari Dana penanganan Covid-19 itu akan dialokasikan untuk penanganan kesehatan, mulai dari pengadaan sarana

kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD), masker, vitamin, rapid test dan lainnya. Dari berbagai perubahan anggaran yang terjadi, berikut terlihat beberapa anggaran yang mengalami revisi di tahun 2020 untuk mengimbangi penanganan covid 19 di masa pandemi ini. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kabupaten Cianjur melakukan perubahan anggaran tahun 2020 di tahun berjalan. Hal ini disebabkan adanya pandemi dan kebijakan refocussing anggaran dari pemerintah pusat. Berikut data perubahan anggaran yang terjadi di Kabupaten Cianjur.

Uraian	Jumlah		Bertambah/(Berkurang)	%
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
Pendapatan	Rp 3.666.381.720.820,20	Rp 3.859.342.333.573,00	Rp 192.960.612.752,80	5,26
Belanja	Rp 3.697.287.720.820,20	Rp 4.113.726.045.030,77	Rp 416.438.324.210,57	11,26
Surplus/(Defisit)	Rp (30.906.000.000,00)	Rp (254.383.711.457,77)	Rp (223.477.711.457,77)	723,09
Pembiayaan neto	Rp 30.906.000.000,00	Rp 254.383.711.457,77	Rp 223.477.711.457,77	723,09
Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

Perubahan anggaran tersebut di tetapkan pada tanggal 22 September 2020. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa perubahan anggaran terjadi baik disisi pendapatan, belanja,serta pembiayaan neto. Semua perubahan anggaran tersebut dilakukan dalam rangka penanganan covid 19 di Kabupaten Cianjur. Bahkan di sisi pembiayaan meningkat sebesar Rp. 254.383.711.457,77 hal ini dikarenakan pembiayaan dalam rangka penanganan covid 19 begitu tinggi, dari mulai alat kesehatan, alat rapid tes, serta dari sisi dana – dana bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cianjur untuk masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini.

E. KESIMPULAN

Kebijakan penganggaran daerah pada saat pandemi COVID-19 tentunya harus berbasiskan pada kebutuhan untuk mempercepat penanganan baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar lahirnya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Namun, potensi terjadinya penyimpangan kebijakan keuangan daerah dari adanya *Refocusing* anggaran tersebut tampak jelas yaitu dengan menempatkan kedudukan kepala daerah atau organ eksekutif dalam masalah penganggaran maupun pelaksanaan anggaran. Padahal dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimaksud penganggaran daerah harus dirumuskan oleh organ eksekutif dan legislatif. Di sinilah maka sudah seharusnya instruksi presiden terkait *Refocusing* anggaran daerah bukan berbentuk Instruksi Presiden akan tetapi harus diganti dengan Peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang yang seyogyanya nantinya sistem penganggaran yang demikian akan menjadikan dasar hukum termasuk derajat pelaksanaan penganggaran daerah dijalankan dan memiliki landasan yuridis yang jelas.

Kebijakan refocusing anggaran tentunya harus berjalan sesuai dengan aturan dengan memperkuat integrasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Pengawasan atas refocusing anggaran juga tentunya harus dilakukan oleh berbagai pihak agar tidak terjadi penyelewengan anggaran di masa pandemi covid-19 ini.

REFERENSI

- Andik Suyitno, Jurnal Public Policy Volume 6 No.2 tahun 2020, Dampak Pandemi Terhadap Penyerapan Anggaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto
- Achmat Subekan, Azwar Iskandar, *EKONOMIKAWAN* Volume 20 No. 2 Tahun 2020 ISSN 1693-7600, Pandemi Covid-19 dan Kebijakan Anggaran Defisit : Analisis Konjungtur Ekonomi
- Dadan Ramdhani, JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.10 No.1, April 2017 Hal. 134 – 147, Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

- Fakhrul Rozi Yamali , Ririn Noviyanti Putri, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), September 2020, 384-388, Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia
- Faura Dea Ayu Pinasti, *Wellness and Healthy Megazine* Volume 2 No.2 tahun 2020 p-ISSN 2655-9951, Analisis Dampak Pandemi Corona Virus Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan
- Febrian Adi Nugraha, Asis Riat Winarto, Rochmat Aldy Purnomo, *UIGM Jurnal Pemerintahan dan Politik* Volume 5 No 3, Analisis Pengalihan Anggaran Sebagai Solusi Terhadap Hambatan Ekonomi Masyarakat Ponorogo Akibat Covid-19
- Henny Juliani, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN. 2621–2781 Online, Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020
- Henny Juliani, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 4, November 2020 ISSN. 2621–2781 Online, Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19
- Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto, *Halu Oleo Law Review* Volume 4 Issue 2, September 2020 P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754, Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19
- Mutik Aromsin Putri , Rusi Septyanani , Aris Prio Agus Santoso, SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPER HUBISINTEK 2020, Dampak Covid-19 pada Perekonomian Indonesia
- Natta Sanjaya, *Jurnal Ilmu Administrasi* Volume 17 No.2 tahun 2020, Kebijakan Penganggaran Daerah Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus pada pemerintah daerah Provinsi Banten)
- Nila Trisna, Nodi Marefanda, *Jurnal Public Policy* 1, Implementasi akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat
- Rafi, *LEGISLATIF* Volume 4 tahun 2020, Public Trust building Strategy terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah proses Refocusing dan Realokasi APBD dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19
- Rizki Nor Azimah, Ismi Nurkhasanah, dkk. *EMPATI* Volume 9 No 1 tahun 2020. Analisis Dampak Covid-19 terhadap Sosial Ekonomi Pedagang di Pasar Klaten dan Wonogiri
- Sarip , Aip Syarifudin, Abdul Muaz, Al Mustashfa Volume 5 No.1 tahun 2020 e-ISSN 2549-4112, Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat dan pembangunan Desa
- Siti Indayani, Budi Hartono, *PERSPEKTIF* Volume 18 No 2 tahun 2020 ISSN 1441-8637, Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19
- Fikrar W Eda Refocusing Anggaran Covid 19 diarahkan untuk Tiga Hal <https://aceh.tribunnews.com/2020/09/30/refocusing-anggaran-covid-19->

diarahkan-untuk-tiga-hal-ini-apa-saja, Diunduh pada Senin 19 Juli 2021
pukul 19.00 WIB